

**BAB 4**  
**GAMBARAN UMUM RESPONDEN**

**4.1. Gambaran Singkat Direktorat Jenderal X, Departemen Y**

Saat ini, Direktorat Jenderal X ditopang oleh 226 pegawai dengan kategori seperti diperlihatkan oleh tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Sumber Daya Manusia Ditjen X**  
**Departemen Y**

<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Jabatan Struktural</b>	
	Pejabat Eselon I	1 orang
	Pejabat Eselon II	6 orang
	Pejabat Eselon III	25 orang
	Pejabat Eselon IV	58 orang
<b>2</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	
	Fungsional Arsiparis	8 orang
	Fungsional Pekerja Sosial	2 orang
	Staf	126 orang
<b>3</b>	<b>Menurut Golongan</b>	
	Golongan IV	40 orang
	Golongan III	164 orang
	Golongan II	21 orang
	Golongan I	1 orang
<b>4</b>	<b>Menurut Pendidikan</b>	
	S3	1 orang
	S2	37 orang
	S1	115 orang
	Sarjana Muda/D3	17 orang
	SLTA	51 orang
	SLTP	-
	SD	5 orang
<b>5</b>	<b>Menurut Jenis Kelamin</b>	
	Pria	131 orang
	Wanita	95 orang
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>226 orang</b>

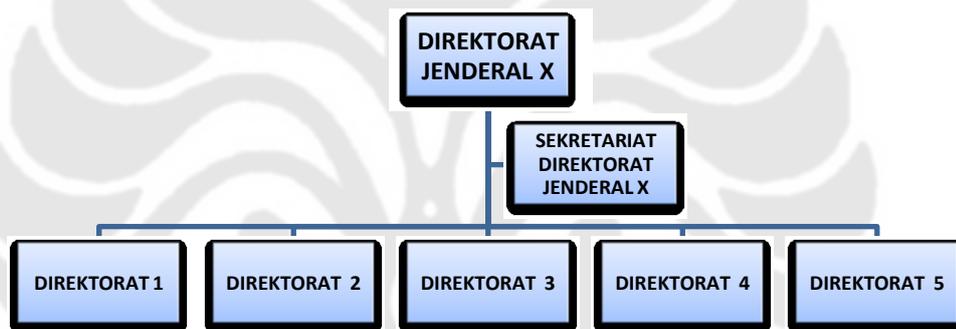
*Sumber: Laki Ditjen X 2009*

Direktorat Jenderal X merupakan unit eselon I berada langsung di bawah Menteri Y yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan strategis

pembangunan bidang XXX bagi penyandang masalah XXXX melalui pelaksanaan program serta kegiatan pemberian bantuan xxxxx kebutuhan dasar serta perlindungan xxxxxx. Adapun di dalam penyelenggaraan program dan kegiatannya, Ditjen X dibiayai oleh APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara).

Adapun perihal struktur organisasi Direktorat Jenderal X, Departemen Y, dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Bagan 4.2**  
**Struktur Organisasi Direktorat Jenderal X**  
**Departemen Y**



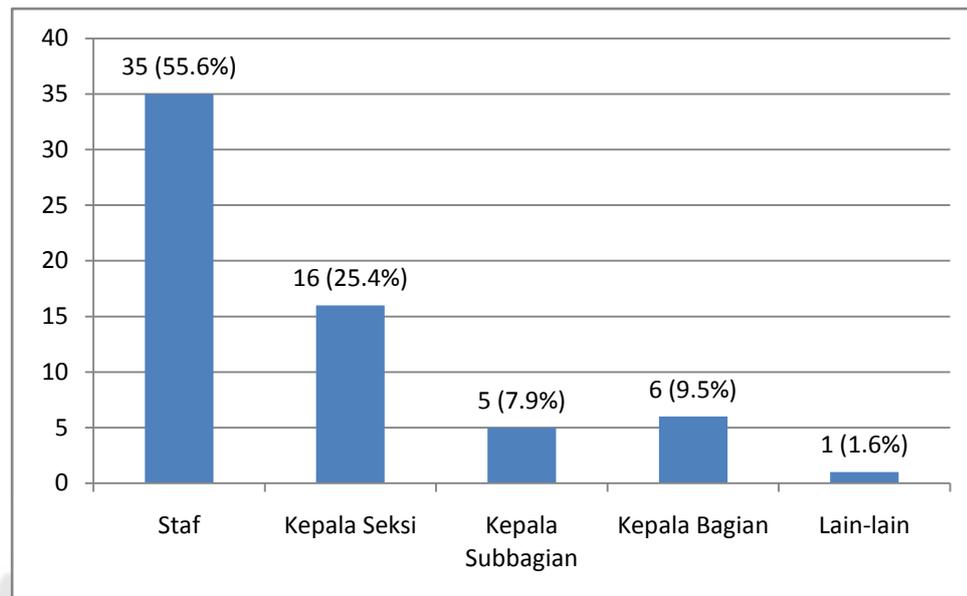
*Sumber:* Lakip Ditjen X 2009

Direktorat Jenderal X meruakan salah satu direktorat pada Departemen Y. Dari bagan 4.2 di atas, terlihat bahwa Direktorat Jenderal X ditopang oleh 5 (lima) direktorat dan 1 (satu) sekretariat jenderal.

## 4.2. Biodata responden (Analisis Univariat)

### 1. Jabatan responden

**Grafik 4.a**  
**Jabatan Responden**



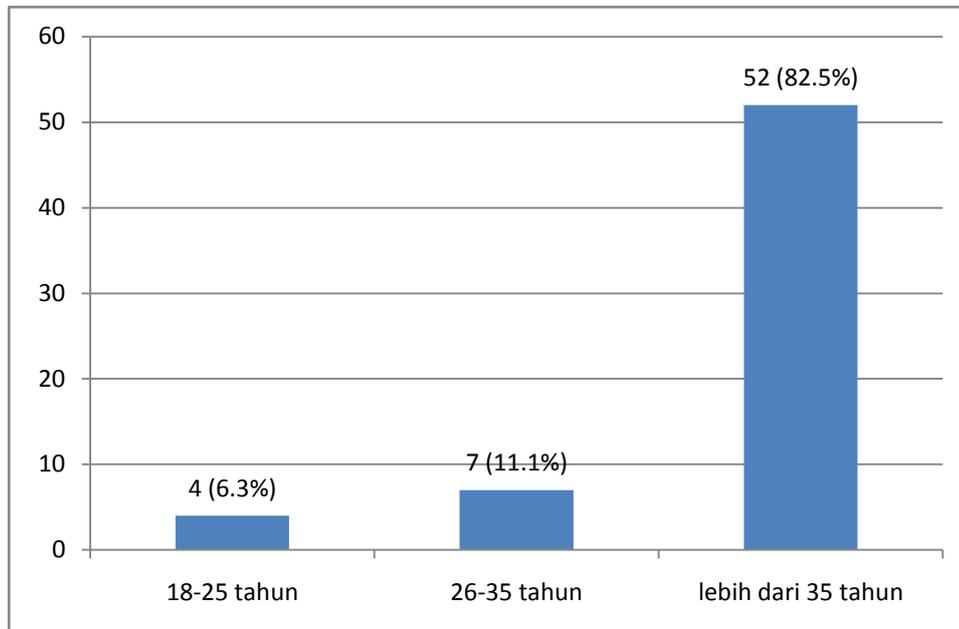
*Sumber:* Data Primer SPSS

Dari grafik 2.a di atas, terlihat bahwa terdapat 5 (lima) kategori jabatan responden. Dari 63 responden, mayoritas responden atau paling banyak menjabat sebagai staf, yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden atau sebesar 55,6%. Adapun kelompok responden yang memiliki jabatan kepala seksi berada pada urutan kedua setelah staf, yaitu sebanyak 16 (enam belas) responden atau sebesar 25,4%. Menyusul berikutnya yaitu kelompok responden yang memiliki jabatan kepala bagian sebanyak 6 (enam) responden atau sebesar 9,5%.

Pada urutan keempat, dalam hal jumlah terbanyak, terdapat kelompok responden yang memiliki jabatan kepala subbagian, yaitu sebanyak 5 (lima) responden atau sebesar 7,9%. Sementara, di urutan terakhir, yang juga merupakan kelompok kategori yang paling sedikit, terdapat 1 (satu) responden atau sebesar 1,6% yang memiliki jabatan lain-lain.

## 2. Usia responden

**Grafik 4.b**  
**Usia Responden**



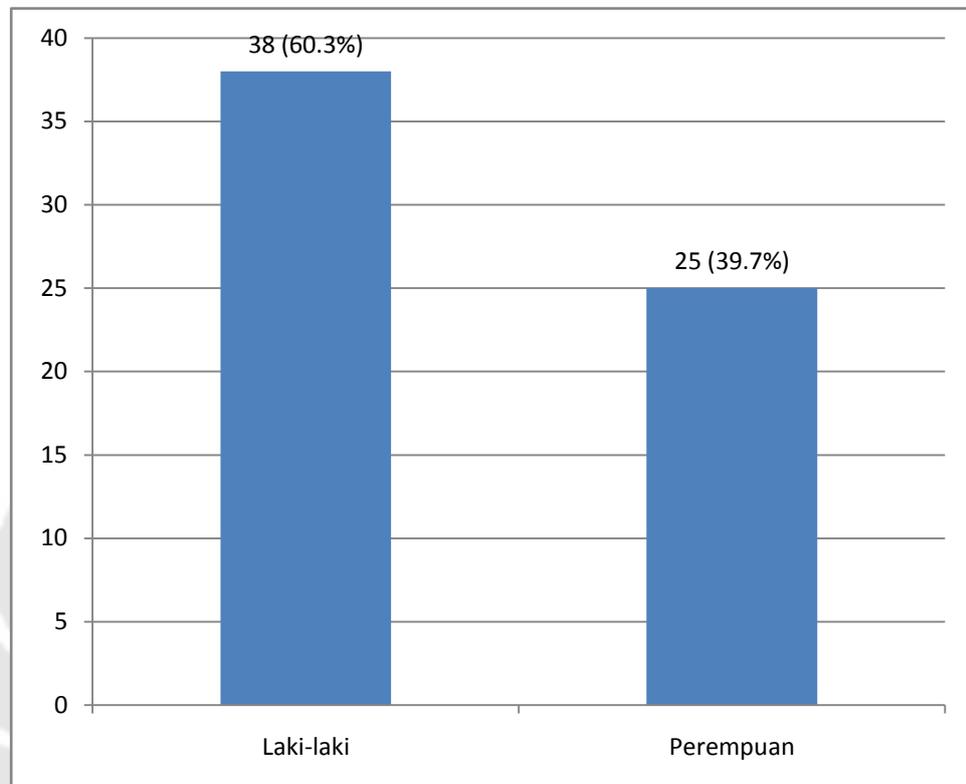
*Sumber: Data Primer SPSS*

Dari grafik 2.b di atas, terdapat sebanyak 3 (tiga) kelompok kategori usia responden, yakni kelompok kategori usia 18-25 (delapan belas hingga dua puluh lima) tahun, kelompok kategori usia 26-35 (dua puluh enam hingga tiga puluh lima) tahun, dan kelompok kategori usia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun. Terlihat bahwa dari sebanyak 63 (enam puluh tiga) responden, paling banyak atau mayoritas responden berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, yaitu sebanyak 52 (lima puluh dua) responden atau sebesar 82,5%.

Dari grafik 2.b di atas, juga terlihat bahwa hanya sebanyak 7 (tujuh) responden atau sebesar 11,1% yang berusia 26-35 (dua puluh enam hingga tiga puluh lima) tahun. Yang paling sedikit atau kelompok kategori usia yang minoritas ialah para responden yang berusia 18-25 (delapan belas hingga dua puluh lima) tahun, yaitu sebanyak 4 (empat) responden atau sebesar 6,3%.

### 3. Jenis kelamin responden

**Grafik 4.c**  
**Jenis Kelamin Responden**



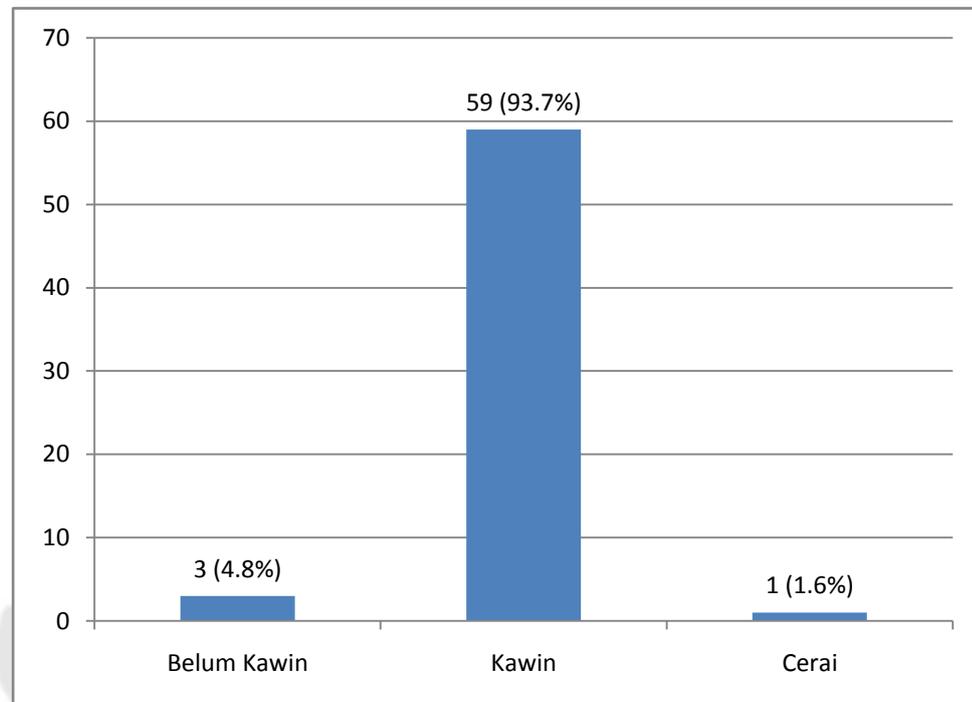
*Sumber: Data Primer SPSS*

Dari grafik 2.c di atas, terdapat hanya sebanyak 2 (dua) kategori jenis kelamin responden, yaitu kelompok responden berjenis kelamin laki-laki serta kelompok responden yang berjenis kelamin perempuan.

Membaca grafik di atas, terlihat bahwa dari 63 (enam puluh tiga) responden, paling banyak atau mayoritas responden memiliki jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) responden atau sebesar 60,3%. Sementara, sisanya, yang juga merupakan kelompok responden yang memiliki jenis kelamin paling sedikit atau minoritas, yaitu kelompok responden yang memiliki jenis kelamin perempuan yang jumlahnya hanya 25 (dua puluh lima) responden atau sebesar 39,7%.

#### 4. Status perkawinan responden

**Grafik 4.d**  
**Status Perkawinan Responden**



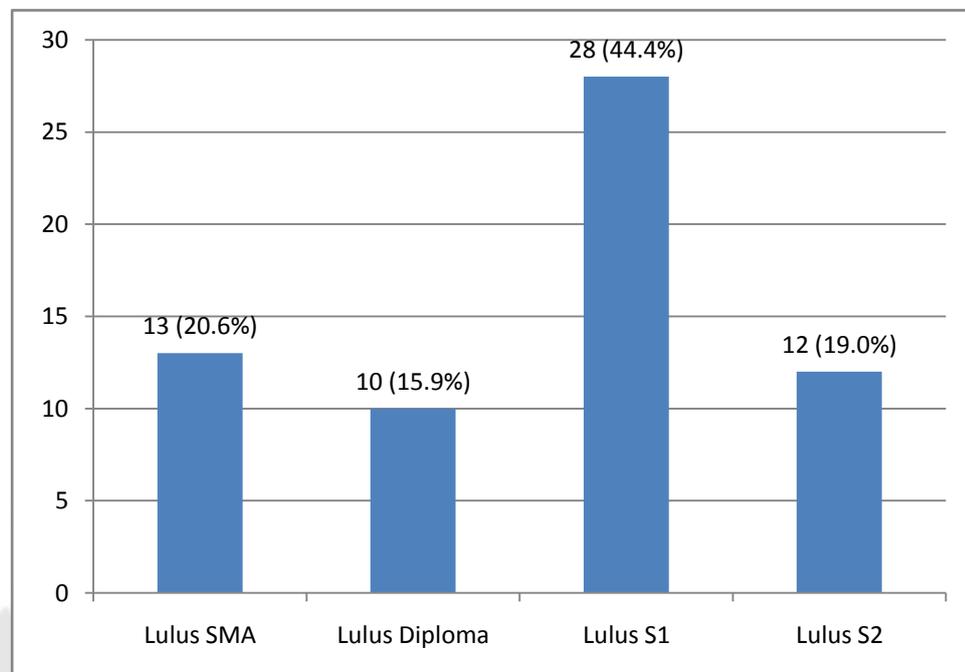
*Sumber: Data Primer SPSS*

Dari grafik 2.d di atas, terlihat bahwa terdapat sebanyak 3 (tiga) kelompok responden dalam kategori status perkawinan, yaitu kelompok responden yang memiliki kategori belum kawin, kelompok responden yang memiliki kategori kawin, serta kelompok responden yang memiliki kategori cerai. Dari sebanyak 63 (enam puluh tiga) responden, paling banyak atau mayoritas responden berada pada kelompok yang memiliki status kawin, yakni sebanyak 59 (lima puluh sembilan) responden atau sebesar 93,7%.

Sementara, pada urutan kedua setelah itu, terdapat kelompok responden yang memiliki status perkawinan belum kawin, yaitu hanya dimiliki oleh 3 (tiga) responden atau sebesar 4,8%. Adapun sisanya, di urutan terakhir, yang juga merupakan kelompok yang minoritas dalam kategori status perkawinan, terdapat 1 (satu) responden atau sebesar 1,6% dengan status perkawinan cerai.

## 5. Tingkat pendidikan responden

**Grafik 4.e**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



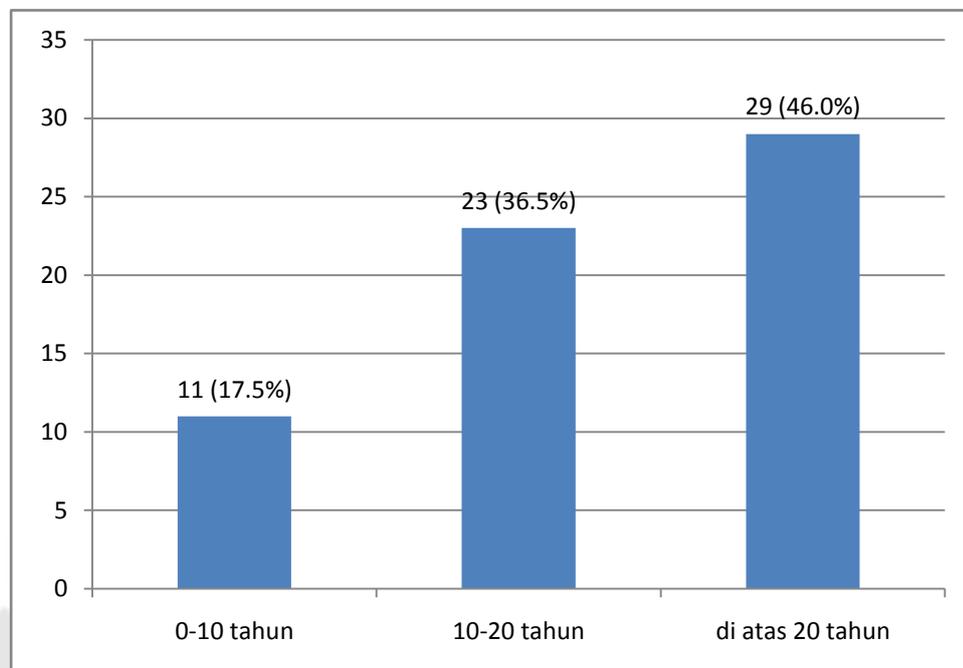
*Sumber:* Data Primer SPSS

Dari grafik 2.e di atas, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) kelompok kategori responden dalam hal tingkat pendidikan, yakni kelompok kategori yang lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), kelompok kategori yang lulus Diploma, kelompok kategori yang lulus S1 (Strata Satu), dan kelompok kategori yang lulus S2 (Strata Dua).

Dari sebanyak 63 (enam puluh tiga) responden, paling sedikit atau yang minoritas yaitu kelompok responden yang berkategori pendidikan diploma, yakni sebanyak 10 (sepuluh) responden atau sebesar 15,9%. Sementara, responden dengan kelompok kategori pendidikan S2 (Strata Dua) sebanyak 12 (dua belas) responden atau sebesar 19%. Adapun kelompok kategori responden yang berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 13 (tiga belas) responden atau sebesar 20,6%. Sisanya, yang paling mendominasi atau mayoritas, yakni kelompok kategori responden dengan pendidikan S1 (Strata Satu), yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) responden atau sebesar 44,4%.

## 6. Masa kerja responden

**Grafik 4.f**  
**Masa Kerja Responden**



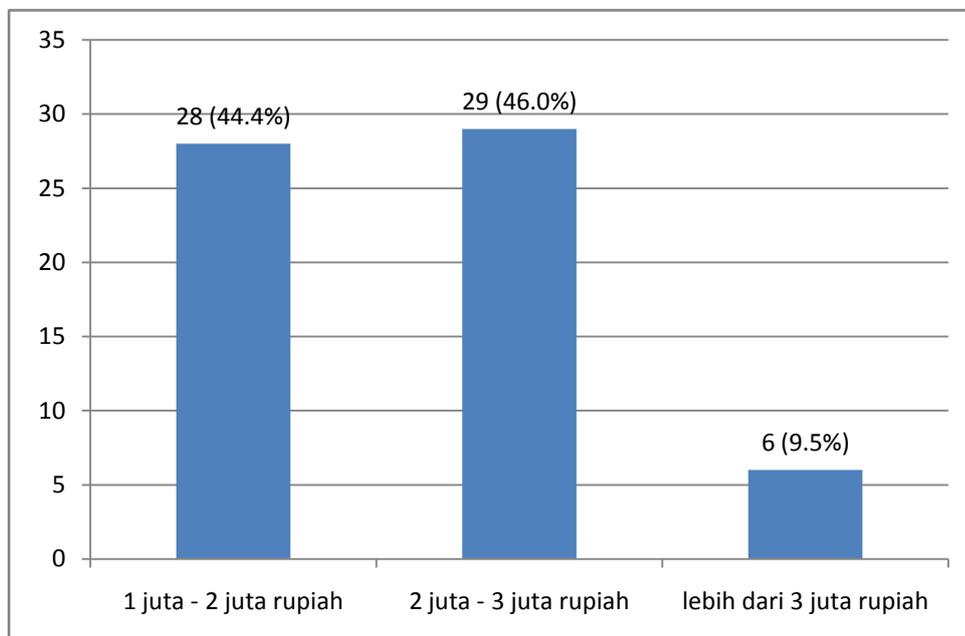
*Sumber: Data Primer SPSS*

Dari grafik 2.f di atas, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok kategori masa kerja responden, yakni kelompok kategori masa kerja 0-10 (nol hingga sepuluh) tahun, kelompok kategori masa kerja 10-20 (sepuluh hingga dua puluh) tahun, dan kelompok kategori masa kerja di atas 20 (dua puluh) tahun.

Dari 63 (enam puluh tiga) responden, paling banyak atau mayoritas responden termasuk dalam kelompok kategori masa kerja yang memiliki masa kerja di atas 20 (dua puluh) tahun, yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) responden atau sebesar 46%. Adapun terbanyak kedua, yaitu responden yang masuk ke dalam kelompok kategori yang bermasa kerja 10-20 (sepuluh hingga dua puluh) tahun berjumlah 23 (dua puluh tiga) responden atau sebanyak 36,5%. Sisanya, yang juga merupakan minoritas atau kelompok yang paling sedikit, yakni para responden yang masuk ke dalam kelompok berkategori masa kerja 0-10 (nol hingga sepuluh) tahun dengan jumlah 11 (sebelas) responden atau sebesar 17,5%.

## 7. Jumlah pendapatan responden dalam 1 bulan

**Grafik 4.g**  
**Jumlah Pendapatan Responden dalam 1 Bulan**



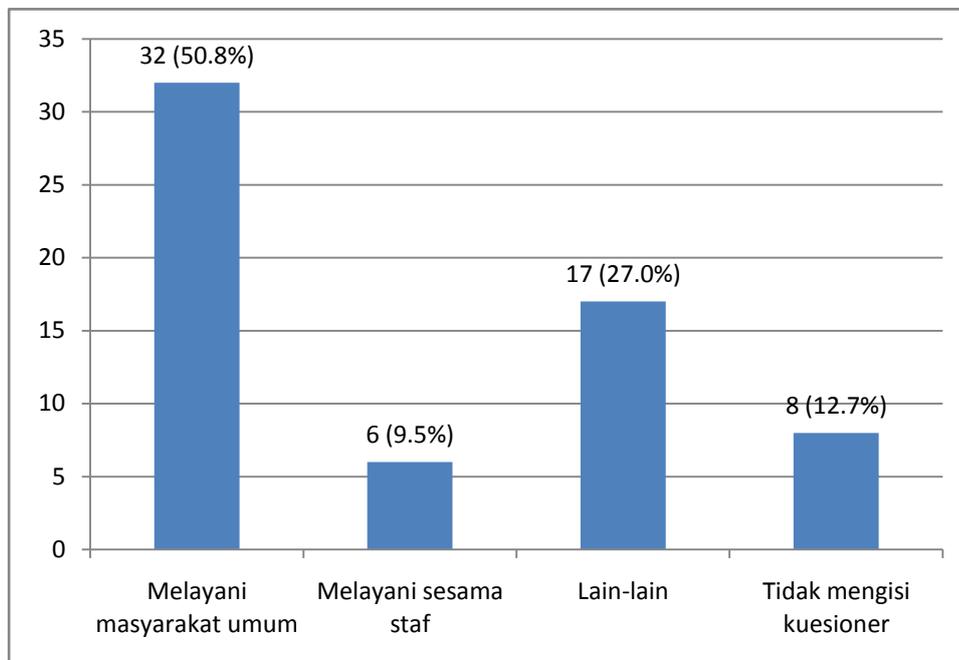
*Sumber: Data Primer SPSS*

Dari grafik 2.g di atas, terlihat bahwa terdapat sebanyak 3 (tiga) kelompok kategori pendapatan dalam sebulan, yaitu responden dengan kelompok kategori berpendapatan 1 (satu) juta hingga 2 (dua) juta rupiah, responden dengan kelompok kategori berpendapatan 2 (dua) juta hingga 3 (tiga) juta rupiah, serta responden dengan kelompok kategori berpendapatan lebih dari 3 (tiga) juta rupiah.

Dari sebanyak 63 (enam puluh tiga) responden, hanya 6 (enam) responden atau sebesar 9,5% yang masuk ke dalam kelompok yang berkategori pendapatan lebih dari 3 (tiga) juta rupiah dalam sebulan. Sementara, mayoritas atau paling banyak, masuk ke dalam responden dengan kelompok kategori berpendapatan 1 (satu) juta hingga 2 (dua) juta rupiah dalam sebulan, yakni sebanyak 28 (dua puluh delapan) responden atau sebesar 44,4%. Yang paling mendominasi (mayoritas) ialah responden dengan pendapatan 2 (dua) juta hingga 3 (tiga) juta rupiah dalam sebulan, yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) responden atau sebesar 46%.

## 8. Bidang tugas responden

**Grafik 4.h**  
**Bidang Tugas Responden**



*Sumber: Data Primer SPSS*

Dari grafik 2.h di atas, terlihat bahwa terdapat sebanyak 3 (tiga) kelompok kategori responden dalam bidang tugas, yaitu kelompok responden yang bertugas melayani masyarakat umum, kelompok responden yang bertugas melayani sesama staf, serta kelompok responden yang bertugas lain-lain.

Dari 63 (enam puluh tiga) responden, mayoritas atau paling banyak masuk ke dalam kelompok responden dengan tugas melayani masyarakat umum, yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) responden atau sebesar 50,8%. Jumlah terbanyak kedua adalah responden yang bertugas lain-lain, yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) responden atau sebesar 27%. Adapun responden yang masuk ke dalam kelompok bertugas melayani sesama staf berjumlah 6 (enam) responden atau sebesar 9,5%. Sisanya, yakni terdapat sebanyak 8 (delapan) responden atau sebesar 12,7% yang tidak mengisi kuesioner.

### 4.3. Gambaran Singkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>2</sup>

Jika kita sorot balik, sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2003, sebenarnya telah pernah dibentuk beberapa lembaga atau komisi yang bertugas untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Pada masa Orde Lama, telah dibentuk sebuah badan yang khusus menangani masalah korupsi ini yang diberi nama *Paran* (Panitia Retooling Aparatur Negara). *Paran* dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data dirinya dalam bentuk isian formulir yang telah disediakan. Namun, hal ini mendapat reaksi keras dari kalangan pejabat terutama bagi mereka yang korup. Dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir tersebut tidak diserahkan kepada *Paran*, tetapi langsung diserahkan kepada Presiden. Pada akhirnya, *Paran* ini bubar dan menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Upaya untuk menangani masalah korupsi di Indonesia, dengan membentuk sebuah badan, tidak sampai di situ. Setelah *Paran*, pada tahun 1963 (melalui Keputusan Presiden No. 275/1963), dibentuklah sebuah lembaga baru oleh Pemerintah yang kembali dipimpin oleh A.H. Nasution dengan dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo, yakni Operasi Budhi. Operasi Budhi bertanggung jawab untuk menyeret koruptor ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Seperti halnya *Paran*, Operasi Budhi pun mendapat perlawanan yang keras dan keberadaan lembaga ini pada akhirnya berakhir. Keberadaan Operasi Budhi digantikan oleh Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (*Kontrar*). *Kontrar* dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.

---

<sup>2</sup> Dideskripsikan dari Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor. Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberangus Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.

Sementara, pada masa Orde Baru, dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai oleh Jaksa Agung. Akan tetapi, keseriusan TPK dipertanyakan dan pada akhirnya Presiden Soeharto membuat suatu kebijakan, yakni dengan menunjuk *Komite Empat* (dengan tugas utama yakni membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain). Adapun *Komite Empat* ini beranggotakan sejumlah tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, yaitu: Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Namun, terjadi perselisihan tatkala keberadaan lembaga TPK disaingi oleh sebuah lembaga lain dengan tugas yang sama, yakni memberantas korupsi. Ketika Laksamana Sudomo disertai tugas sebagai Pangkoptib, maka dibentuk pula Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas memberantas korupsi. Pada akhirnya, berbarengan dengan kian kuatnya kedudukan para koruptor Orde Baru, maka Opstib pun tidak ada lagi. Tidak jauh berbeda dengan orde/masa sebelumnya, pada masa reformasi ternyata juga masih tetap dijumpai adanya pendirian lembaga yang bertugas untuk menangani masalah korupsi.

Pada era reformasi (pemerintahan Presiden B.J. Habibie), upaya pemberantasan korupsi dimulai dengan diundangkannya UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Alhasil, dibentuklah berbagai komisi atau badan baru, antara lain: KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Sementara, pada era Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, dibentuk TGTPK (Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi) melalui PP No. 19/2000. Dengan demikian, pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengakhiri keberadaan lembaga-lembaga sebelumnya dan menjadikan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya menangani masalah korupsi.